



JPMSI 8 (1), 2026

Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Indonesia

(Indonesian Journal of Science Community Services)

<https://jpfis.unram.ac.id/index.php/jpmsi/index>

Peran DPMPD Provinsi NTB dalam Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Mala Kaulan Saqila^{1*}, Suryati¹, Suci Yunika Maharani¹, Iwan Tanjung Sutarna¹

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia;

Corresponding Author: Mala Kaulan Saqila

Email: Malakaulansaqila@gmail.com

Article Info:

Received : 14 Mei 2026
Revised : 20 Mei 2026
Accepted : 27 Mei 2026
Published : 10 Juni 2026

DOI:

<https://doi.org/10.29303/jpmsi.v8i1.2025>

Keyword:

Village Governance; Institutional Strengthening; DPMPD; Rural Development.

Abstract:

Institutional strengthening of village governance is one of the key factors in realizing effective, transparent, and accountable governance at the local level. Since the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, villages have gained broader authority in managing governance, development, and community empowerment. This condition requires adequate institutional capacity to ensure the optimal implementation of village governance. In this context, the Community and Village Empowerment Service of West Nusa Tenggara Province (DPMPD NTB) has a strategic role in providing guidance, facilitation, and institutional strengthening for village governance. This study aims to analyze the role of DPMPD NTB in strengthening village government institutions and to identify various efforts made to improve the capacity of village officials. This research uses a qualitative approach through literature studies and analysis of relevant policy documents. The findings show that DPMPD NTB plays a role through capacity-building programs for village officials, governance management assistance, and strengthening coordination among village institutions. These efforts contribute to improving the effectiveness of village governance and support the realization of sustainable rural development.

How to Cite: Saqila, M. K., Suryati, Maharani, S. Y., & Sutarna, I. T. (2026). Peran DPMPD Provinsi NTB dalam Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Indonesia (Indonesian Journal Of Science Community Services)*, 8(1), 78-84. <https://doi.org/10.29303/jpmsi.v8i1.2025>

PENDAHULUAN

Penguatan kelembagaan pemerintahan desa merupakan elemen mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di tingkat lokal. Desa, sebagai entitas pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, memegang peranan penting dalam penyediaan layanan publik, pelaksanaan pembangunan, serta upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, kualitas kelembagaan desa menjadi aspek krusial yang tidak dapat diabaikan, mengingat keberadaannya berpengaruh langsung

terhadap mutu pelayanan dan capaian pembangunan di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Rahayu dan Wibowo (2022) yang menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan desa berkorelasi kuat dengan efektivitas pelayanan publik serta keberhasilan pembangunan di wilayah perdesaan.

Peran desa semakin signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas kepada desa dalam mengelola dan mengatur kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul serta kewenangan lokal. Namun demikian, perluasan

kewenangan tersebut menuntut kesiapan kelembagaan yang memadai agar dapat dijalankan secara optimal. Dalam perspektif kebijakan publik, Riant Nugroho (2021) menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas lembaga pelaksana dalam mengimplementasikannya secara efektif.

Dalam realitasnya, peningkatan kewenangan yang dimiliki desa belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan kelembagaan yang memadai. Berbagai permasalahan masih ditemukan, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, lemahnya tata kelola organisasi, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga desa. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirancang dengan pelaksanaannya di lapangan. Sejalan dengan hal tersebut, laporan World Bank (2022) mengidentifikasi bahwa rendahnya kapasitas kelembagaan merupakan salah satu tantangan utama dalam tata kelola desa di Indonesia, yang berdampak pada efektivitas administrasi serta tingkat akuntabilitas pemerintahan desa.

Lebih lanjut, penelitian Kato, Sato, dan Kubo (2023) menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal tidak dapat dilepaskan dari proses pembinaan yang berkelanjutan, seperti pelatihan, pendampingan, dan penguatan sistem organisasi. Tanpa adanya dukungan tersebut, kewenangan yang telah diberikan kepada desa berpotensi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah daerah sebagai pihak yang melakukan pembinaan.

Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki posisi strategis dalam memberikan pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Widodo (2021), implementasi kebijakan publik memerlukan keterlibatan aktif dari aktor pemerintah agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat dijalankan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

Berbagai program pembinaan telah dilakukan oleh pemerintah daerah, di antaranya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis, penguatan lembaga kemasyarakatan desa, pendampingan dalam pengelolaan administrasi, serta pengembangan sistem informasi desa. Program-program tersebut pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa agar

mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih efektif. Meskipun demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sejumlah desa masih mengalami keterbatasan dalam pengelolaan administrasi, rendahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi desa, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga desa.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Dalam hal ini, pendekatan penelitian empiris menjadi penting untuk memahami dinamika yang terjadi di lapangan secara lebih komprehensif. Creswell dan Creswell (2021) menyatakan bahwa penelitian sosial bertujuan untuk memahami fenomena secara kontekstual, khususnya dalam melihat bagaimana kebijakan dijalankan dalam praktik. Pandangan ini diperkuat oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2021) yang menegaskan bahwa analisis kualitatif memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola dan hubungan yang muncul dari realitas empiris secara lebih mendalam.

Sejauh ini, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek pengelolaan dana desa maupun pemberdayaan masyarakat, sementara penelitian yang secara khusus mengkaji peran pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan pemerintahan desa masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang perlu diisi, terutama terkait analisis empiris mengenai peran pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan desa.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji peran DPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penguatan kelembagaan pemerintahan desa melalui pendekatan analisis kelembagaan yang tidak hanya berfokus pada aspek kebijakan, tetapi juga pada dinamika implementasinya di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis kapasitas aparatur desa, tata kelola organisasi pemerintahan desa, serta pola koordinasi antar lembaga desa dalam satu kerangka analisis yang lebih komprehensif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penguatan kelembagaan pemerintahan desa serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam konteks pemerintahan desa dan kelembagaan lokal.

METODE

Kegiatan magang berlangsung selama ±45 hari atau sekitar satu setengah bulan, terhitung sejak 28 Januari sampai dengan 13 maret di lingkungan DPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan magang difokuskan pada keterlibatan langsung mahasiswa dalam aktivitas administrasi pemerintahan desa,

penguatan kelembagaan masyarakat, serta sistem pelayanan publik yang dijalankan oleh DPMPD Provinsi NTB. Kegiatan tersebut menjadi sarana implementasi ilmu administrasi publik secara praktis sehingga mahasiswa dapat memahami dinamika birokrasi pemerintahan daerah secara empiris, profesional, dan kontekstual.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pola partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran mendalam mengenai proses birokrasi, sistem administrasi pelayanan, serta mekanisme pembinaan pemerintahan desa berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Menurut Creswell dan Creswell (2021), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara holistik melalui interaksi langsung dengan lingkungan penelitian. Oleh sebab itu, metode ini dinilai relevan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara tata kelola internal birokrasi dengan efektivitas pelaksanaan program pembinaan desa.

Selama kegiatan magang berlangsung, mahasiswa ditempatkan pada beberapa unit kerja strategis, yaitu Bidang Kelembagaan Desa, Sub Bagian Administrasi Kependudukan, dan Bidang Penataan Kawasan Desa. Pada Bidang Kelembagaan Desa, mahasiswa berpartisipasi dalam proses pendataan dan verifikasi administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), khususnya Posyandu, serta membantu pengarsipan dokumen kelembagaan desa. Pada Sub Bagian Administrasi Kependudukan, mahasiswa terlibat dalam kegiatan rekapitulasi data agregat kependudukan, klasifikasi kelompok rentan, serta pengelolaan administrasi data desa. Sementara itu, pada Bidang Penataan Kawasan Desa, mahasiswa membantu penataan arsip tata usaha, telaah administrasi laporan kegiatan, dan digitalisasi dokumen pemerintahan desa.

Pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara informal, dan studi dokumentasi. Observasi partisipatif dilaksanakan dengan mengikuti aktivitas rutin aparatur DPMPD, seperti apel pagi, koordinasi antarbidang, pelayanan administrasi, dan pengelolaan arsip kelembagaan desa. Wawancara informal dilakukan bersama aparatur DPMPD untuk memperoleh informasi mengenai kendala administrasi desa, sistem pembinaan kelembagaan, serta implementasi digitalisasi administrasi pemerintahan desa. Adapun studi dokumentasi dilakukan melalui penelaahan dokumen kelembagaan desa, data agregat kependudukan, laporan kegiatan, dan arsip administrasi pemerintahan desa.

Data yang diperoleh selama kegiatan magang dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2021) yang meliputi tahapan

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan selama kegiatan berlangsung sehingga setiap temuan lapangan dapat diinterpretasikan secara sistematis dan mendalam. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan magang tidak hanya memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa, tetapi juga menghasilkan pemahaman empiris mengenai penguatan kelembagaan pemerintahan desa berbasis prinsip good governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Desa tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek pembangunan, melainkan telah ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses pembangunan berbasis masyarakat. Perubahan paradigma tersebut menuntut adanya penguatan kapasitas kelembagaan desa agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat secara optimal. Dalam konteks tersebut, penguatan otonomi desa menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Kurniawan, 2021). Oleh karena itu, DPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki posisi strategis sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan penguatan tata kelola pemerintahan desa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan magang, DPMPD Provinsi NTB menunjukkan berbagai upaya penguatan kelembagaan desa melalui beberapa aspek utama, antara lain penguatan budaya birokrasi internal, pembinaan legalitas kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan administrasi kependudukan berbasis data, serta penataan administrasi dan tata usaha pemerintahan desa. Berbagai upaya tersebut memperlihatkan bahwa penguatan kelembagaan desa tidak hanya diarahkan pada pemenuhan aspek administratif formal, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta implementasi prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Sari & Hidayat, 2022).

Kemapanan Budaya Birokrasi sebagai Prakondisi Pelayanan

Dalam perspektif administrasi publik, efektivitas suatu lembaga dalam menjalankan fungsi pelayanan eksternal sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola internal organisasi (Widodo, 2021). Berkaitan dengan hal tersebut, DPMPD Provinsi NTB memperlihatkan pola birokrasi yang relatif adaptif melalui penguatan

budaya organisasi sebelum menjalankan fungsi pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintahan desa. Hal tersebut tercermin melalui pelaksanaan apel pagi secara rutin, evaluasi kerja berkala, koordinasi lintas bidang, serta pembagian tugas yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Praktik tersebut tidak hanya menunjukkan kedisiplinan administratif, tetapi juga menjadi media konsolidasi organisasi, penguatan komunikasi internal, distribusi kewenangan kerja, serta mekanisme identifikasi dini terhadap berbagai hambatan teknis di lapangan (Maryam, 2016).

Konsep pelayanan publik modern menempatkan birokrasi sebagai institusi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan semata-mata sebagai alat kontrol administratif (Denhardt & Denhardt, 2020). Dalam praktiknya, budaya birokrasi yang tertata memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan administrasi dan pembinaan desa. Koordinasi vertikal maupun horizontal antarpegawai terlihat berjalan cukup efektif sehingga proses pelayanan administrasi, pengelolaan data, dan pendampingan kelembagaan desa dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas komunikasi internal memiliki peran penting dalam meminimalisasi kesalahan informasi pada proses implementasi kebijakan pemerintah daerah di tingkat desa. Profesionalitas aparatur birokrasi menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas (Nugroho, 2022).

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa aparatur DPMPD tidak hanya menjalankan fungsi birokrasi formal, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam membantu pemerintah desa menyelesaikan berbagai persoalan administrasi dan kelembagaan. Pola pelayanan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma birokrasi menuju sistem pelayanan publik yang lebih responsif, adaptif, dan partisipatif (Permatasari, 2020). Meskipun demikian, kegiatan magang juga menemukan beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja aparatur, serta luasnya wilayah pembinaan desa yang menyebabkan proses pendampingan belum dapat dilakukan secara optimal dan merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi membutuhkan penguatan kapasitas aparatur serta dukungan sistem kerja yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik.

Advokasi Yuridis LKD dan Formulasi Kebijakan Berbasis Bukti

Dalam dimensi pemberdayaan masyarakat desa, DPMPD Provinsi NTB memiliki peran strategis dalam memastikan legalitas administratif Lembaga

Kemasyarakatan Desa (LKD), khususnya Posyandu sebagai lembaga pelayanan dasar masyarakat di bidang kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, proses pendataan dan verifikasi kelembagaan dilakukan melalui beberapa tahapan administratif, seperti pengecekan rasio kader, identifikasi status keaktifan lembaga, verifikasi struktur kepengurusan, hingga pemeriksaan legalitas Surat Keputusan (SK) pembentukan lembaga. Proses tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan desa tidak hanya diarahkan pada pemenuhan administrasi formal, tetapi juga bertujuan menciptakan tata kelola kelembagaan yang memiliki legitimasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas yang jelas (Ra'is, 2022).

Penguatan kelembagaan pemerintahan desa berbasis prinsip good governance menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pemerintahan desa yang partisipatif, profesional, dan akuntabel (Sari & Hidayat, 2022). Selain menjalankan fungsi pengawasan administratif, DPMPD juga berperan dalam meningkatkan kapasitas manajerial kelembagaan desa melalui pendampingan teknis dan pembinaan administrasi secara berkelanjutan. Pendampingan tersebut bertujuan agar setiap LKD mampu memenuhi standar administrasi kelembagaan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketimpangan data kelembagaan, perbedaan nomenklatur lembaga antarwilayah, rendahnya kapasitas administrasi aparatur desa, serta lambatnya proses digitalisasi arsip dan dokumen kelembagaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas manajerial dan penguasaan teknologi informasi antar desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kato, Sato, & Kubo, 2023).

Kapasitas aparatur desa dalam mengelola administrasi pemerintahan menjadi unsur penting dalam mendukung efektivitas kelembagaan desa (Putri, 2022). Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa belum sepenuhnya berjalan optimal. Sebagian desa masih menggunakan sistem administrasi manual yang berdampak pada keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian data, serta rendahnya efektivitas pengarsipan dokumen kelembagaan. Menanggapi kondisi tersebut, DPMPD memanfaatkan data kelembagaan desa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembinaan berbasis bukti (evidence-based policy). Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan pola intervensi pemerintah dari model kebijakan yang bersifat seragam menuju pendekatan pembinaan yang lebih adaptif berdasarkan kapasitas dan tingkat kemandirian masing-masing desa (Firdaus, 2023).

Kedudukan Vital Data Kependudukan sebagai Pijakan Perencanaan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kualitas otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi. Melalui Sub Bagian Administrasi Kependudukan, DPMPD Provinsi NTB melakukan pengelolaan dan agregasi data demografi secara sistematis, meliputi komposisi gender, status perkawinan, kelompok rentan, tingkat kesejahteraan masyarakat, hingga identifikasi penduduk berisiko. Pengelolaan data tersebut menunjukkan bahwa administrasi kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung proses perencanaan pembangunan desa yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan masyarakat (World Bank, 2022).

Perencanaan pembangunan desa berbasis evidence-based policy memungkinkan pemerintah desa menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat (Firdaus, 2023). Ketidakakuratan maupun keterlambatan pemutakhiran data sering kali menyebabkan kegagalan kebijakan, seperti kesalahan penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, maupun bias dalam program penanganan stunting. Oleh karena itu, validitas data menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelayanan publik serta penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran (Permatasari, 2020).

Melalui penataan administrasi kependudukan dan pengarsipan data yang dilakukan secara sistematis, DPMPD berupaya membangun pola perencanaan pembangunan desa yang lebih objektif dan berbasis fakta. Data kependudukan digunakan sebagai dasar dalam memetakan kebutuhan masyarakat, menentukan prioritas pembangunan, serta mengidentifikasi kelompok masyarakat yang memerlukan intervensi kebijakan secara khusus. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan tata kelola pemerintahan desa menuju sistem perencanaan berbasis data dan evidence-based policy yang lebih efektif dan akuntabel. Selain meningkatkan ketepatan program pembangunan, penggunaan data yang terintegrasi juga mendukung penerapan prinsip good governance, terutama pada aspek efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik (Kurniawan, 2021).

Tata Usaha yang Akuntabel sebagai Tameng Maladministrasi

Fokus pembinaan DPMPD juga diarahkan pada penguatan tertib administrasi dan tata usaha pemerintahan desa. Berdasarkan hasil kegiatan magang, pembinaan administrasi dilakukan melalui

pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan, penyusunan dokumen Peraturan Desa (Perdes), pengarsipan surat-menyurat, serta dokumentasi kegiatan pemerintahan desa. Sistem pengarsipan dokumen yang diterapkan menunjukkan adanya upaya penguatan mekanisme pengawasan internal dalam tata kelola administrasi desa (Ra'is, 2022).

Akuntabilitas pelayanan publik pada pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas administrasi dan tata usaha pemerintahan desa (Handayani, 2021). Selain itu, DPMPD juga mulai mendorong penerapan digitalisasi administrasi desa sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen pemerintahan. Digitalisasi administrasi dilakukan melalui penginputan data, penyimpanan arsip digital, serta pengelolaan laporan administrasi berbasis teknologi informasi. Langkah tersebut bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan administratif, mempercepat proses pelayanan, dan mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa (World Bank, 2022).

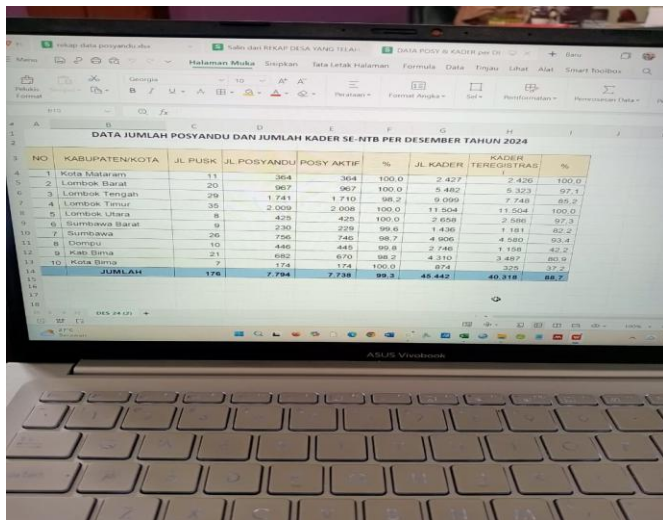
Digitalisasi administrasi desa mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sistem pengarsipan pemerintahan desa (Pratama, 2021). Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian Yusuf (2023) yang menjelaskan bahwa transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi instrumen penting dalam menciptakan birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan terukur. Implementasi prosedur administrasi yang sistematis menunjukkan bahwa DPMPD berupaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas tata usaha dan administrasi pemerintahan desa menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penerapan prinsip-prinsip good governance di tingkat desa (Maryam, 2016).

Kontribusi Nyata Mahasiswa dalam Kegiatan Magang

Pelaksanaan kegiatan magang di DPMPD Provinsi NTB tidak hanya memberikan pengalaman pembelajaran praktis bagi mahasiswa, tetapi juga menghasilkan kontribusi nyata terhadap proses administrasi dan pelayanan birokrasi di lingkungan instansi. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas administratif yang mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa, khususnya pada bidang kelembagaan desa, administrasi kependudukan, dan penataan tata usaha pemerintahan desa.

Kontribusi mahasiswa terlihat melalui kegiatan pengarsipan dokumen kelembagaan desa, verifikasi administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), rekapitulasi data agregat kependudukan, serta

digitalisasi dokumen pemerintahan desa. Mahasiswa juga membantu proses klasifikasi dokumen administrasi, pengecekan legalitas Surat Keputusan (SK) kelembagaan, penyusunan arsip tata usaha, hingga telaah administrasi surat perjalanan dinas. Aktivitas tersebut membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen dan mendukung ketertiban administrasi pada beberapa bidang kerja di lingkungan DPMPD Provinsi NTB.



| DATA JUMLAH POSYANDU DAN JUMLAH KADER SE-NTB PER DESEMBER TAHUN 2024 | | | | | | |
|--|----------------|---------|-------------|------------|-------|-----------------------|
| NO | KABUPATEN/KOTA | JL PUSK | JL POSYANDU | POSY AKTIF | % | JL KADER TERREGISTRAS |
| 1 | Kota Mataram | 11 | 364 | 364 | 100,0 | 2.427 |
| 2 | Lombok Barat | 20 | 967 | 967 | 100,0 | 5.309 |
| 3 | Lombok Tengah | 29 | 1.741 | 1.710 | 98,2 | 7.748 |
| 4 | Lombok Timur | 35 | 2.009 | 2.008 | 100,0 | 11.504 |
| 5 | Lombok Utara | 8 | 429 | 429 | 100,0 | 2.698 |
| 6 | Sumbawa Barat | 9 | 230 | 228 | 99,6 | 1.336 |
| 7 | Sumbawa | 39 | 756 | 746 | 98,7 | 4.906 |
| 8 | Dompu | 10 | 446 | 445 | 99,8 | 1.198 |
| 9 | Iduk Sernu | 21 | 682 | 670 | 98,2 | 4.310 |
| 10 | Kota Bima | 2 | 174 | 174 | 100,0 | 874 |
| JUMLAH | | 176 | 7.794 | 7.738 | 99,3 | 48.442 |

Gambar 1. Rekap Data Posyandu



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

Selain kontribusi administratif, mahasiswa juga melakukan observasi terhadap pola pelayanan publik, budaya birokrasi, dan mekanisme koordinasi antarbidang di lingkungan DPMPD. Kegiatan observasi tersebut memberikan pemahaman empiris mengenai implementasi prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan daerah. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung mengenai pentingnya profesionalitas aparatur, akuntabilitas

administrasi, validitas data, serta efektivitas komunikasi organisasi dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

KESIMPULAN

Kegiatan magang di DPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan pemahaman empiris mengenai pentingnya penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan hasil observasi dan keterlibatan langsung dalam aktivitas birokrasi, diketahui bahwa DPMPD memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan kelembagaan desa melalui penguatan budaya birokrasi, pendampingan legalitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), pengelolaan administrasi kependudukan berbasis data, serta penataan tata usaha pemerintahan desa.

Penguatan budaya birokrasi internal menjadi faktor penting dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional dan responsif. Selain itu, pembinaan legalitas kelembagaan desa dan pemanfaatan data kependudukan berbasis evidence-based policy turut mendukung efektivitas pembangunan desa dan kualitas pelayanan masyarakat. Digitalisasi administrasi pemerintahan desa juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi birokrasi serta meminimalisasi risiko maladministrasi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Kegiatan magang ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam memahami dinamika administrasi publik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengelolaan administrasi dan pelayanan birokrasi di lingkungan DPMPD Provinsi NTB. Melalui keterlibatan langsung dalam pengarsipan dokumen, pendataan kelembagaan desa, rekapitulasi data kependudukan, serta digitalisasi administrasi, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai implementasi prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.

SARAN

1. DPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan terus memperkuat digitalisasi administrasi pemerintahan desa guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik.
2. Pembinaan terhadap kelembagaan desa, khususnya terkait legalitas LKD dan pengelolaan data kependudukan, perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas tata kelola pemerintahan desa semakin optimal.

3. Program magang sebaiknya terus dikembangkan dengan memberikan ruang keterlibatan yang lebih luas bagi mahasiswa dalam berbagai kegiatan strategis sehingga dapat meningkatkan kompetensi praktis di bidang administrasi publik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada DPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat atas kesempatan, bimbingan, dan pengalaman berharga yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan magang sehingga dapat menambah wawasan serta keterampilan dalam bidang pemerintahan dan administrasi publik.

REFERENSI

- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2020). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.
- Firdaus, A. (2023). Evidence-based policy dalam perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Governance dan Politik Lokal*, 5(2), 88-101.
- Handayani, L. (2021). Akuntabilitas pelayanan publik pada pemerintahan desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45-56.
- Kato, H., Sato, Y., & Kubo, R. (2023). Institutional capacity building in local governance: Evidence from rural development programs. *Sustainability*, 15(4), 3567.
- Kurniawan, B. (2021). Good governance dalam penguatan otonomi desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 3(2), 120-132.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(1), 1-18.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2021). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2021). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2022). Reformasi birokrasi dan pelayanan publik di era digital. *Jurnal Administrasi dan Governance*, 4(1), 33-47.
- Permatasari, A. (2020). Pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas. *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 45-57.
- Pratama, A. B. (2021). Digitalisasi administrasi desa dalam meningkatkan pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 77-89.
- Putri, D. A. (2022). Kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 6(1), 55-68.
- Rahayu, D., & Wibowo, A. (2022). Village institutional development and public service delivery in Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 91, 45-54
- Ra'is, D. U. (2022). Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui penerapan akuntabilitas sosial. *Jurnal Governance*, 7(2), 90-104.
- Sari, N., & Hidayat, T. (2022). Penguatan kelembagaan pemerintahan desa berbasis good governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 66-80.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Bayumedia Publishing.
- World Bank. (2022). *Enhancing village governance and institutional capacity in Indonesia*. World Bank Publications.
- Yusuf, M. (2023). Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(2), 101-115.